

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini berangkat dari situasi yang mengancam perempuan di Kongo akibat konflik bersenjata yang tak berkesudahan selama hampir tiga dekade lamanya. Konflik bersenjata menimbulkan dampak yang serius bagi perempuan terutama berkaitan dengan kekerasan seksual. Tingginya angka kekerasan seksual terhadap perempuan dan rendahnya partisipasi perempuan di Kongo memicu respons dari organisasi internasional, termasuk UN Women. UN Women merupakan salah satu badan PBB yang bergerak dalam agenda kesetaraan gender dan perempuan secara global. Untuk menanggapi situasi di Kongo, UN Women mengimplementasikan Resolusi 1325 Dewan Keamanan PBB yaitu *Women, Peace, and Security* di Kongo.

UN Women sebagai organisasi internasional telah melakukan implementasi *Women, Peace, and Security* dalam empat pilar. Pada pilar partisipasi, UN Women mendorong partisipasi perempuan di bidang politik melalui pelatihan terhadap perempuan sebelum pemilu, dan reformasi kebijakan dalam undang-undang pemilu. Hasilnya telah terjadi peningkatan representasi perempuan di Kongo pada tahun 2024. UN Women juga mendorong partisipasi perempuan sebagai agen perdamaian melalui advokasi dan pemetaan gerakan organisasi perempuan.

Pada pilar pencegahan UN Women melakukan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan melalui sosialisasi dan kampanye baik di sekolah

maupun di masyarakat mengenai kekerasan seksual dan *positive masculinity*. Implementasi pilar pencegahan kurang efektif dan signifikan karena terjadinya eskalasi konflik. Pada pilar perlindungan, UN Women memberikan dukungan terhadap Yayasan Panzi untuk layanan korban kekerasan seksual “*one-step centre*”, memperkuat kapasitas medis, menerbitkan panduan HIV, melakukan pengembangan NAP WPS, dan revisi strategi nasional untuk kekerasan berbasis gender.

Pada pilar bantuan dan pemulihan, UN Women memberikan bantuan non-material berupa kapal bagi korban pemerkosaan massal di Kongo, bantuan lahan pertanian dan pelatihan budidaya bagi masyarakat sekitar Taman Virunga, pelatihan budidaya singkong melalui program *Agrifed*, serta pemulihan sosial ekonomi di wilayah Binza melalui program turunan dari *Disarmament, Demobilization, Reintegration* (DDR) yaitu *Community Violence Reduction* (CVR). Sementara bantuan material diberikan kepada Yayasan Panzi untuk mengembangkan model “*one-step centre*”. Bantuan material juga diberikan untuk wilayah rentan dan terdampak konflik, pemberdayaan perempuan, mengatasi kekerasan terhadap perempuan, serta bantuan untuk *women, peace, and security*.

Dalam implementasi keempat pilar tersebut, pilar yang paling signifikan dalam praktiknya jika dilihat dari jumlah dan jangkauan program adalah bantuan dan pemulihan. Pilar partisipasi cukup signifikan meskipun tidak mencapai hasil yang maksimal. Sedangkan pilar pencegahan dan perlindungan dalam pelaksanaannya masih kurang signifikan. Hambatan dalam implementasi *Women, Peace, and Security* oleh UN Women adalah norma dan budaya patriarki serta

persepsi tradisional terhadap perempuan yang menganggap bahwa perempuan tidak cocok untuk posisi kepemimpinan, kemudian terjadinya eskalasi konflik membuat korban perempuan semakin meningkat sehingga memerlukan upaya pencegahan dan perlindungan yang lebih signifikan.

4.2 Saran

Hambatan yang dialami dalam penelitian ini adalah keterbatasan data karena penulis hanya menggunakan data sekunder. Beberapa data sekunder juga memberikan penjelasan yang kurang lengkap. Seperti laporan dari UN Women yang tidak selalu ada di setiap tahunnya, serta program-program yang dijelaskan dalam laporan terkadang tidak memiliki data dan penjelasan yang cukup. Penelitian yang membahas mengenai *women, peace, and security* yang dilakukan oleh organisasi internasional di Kongo juga masih minim. Oleh karena itu, peneliti yang selanjutnya disarankan untuk menambahkan teknik pengumpulan data guna mendapatkan data yang lebih spesifik mengenai program-program yang dilakukan UN Women melalui kerangka WPS.

Peneliti yang selanjutnya disarankan untuk memperbarui jangkauan penelitian dikarenakan di tahun setelah periode penelitian ini situasi keamanan di Kongo semakin memburuk dengan konflik yang tak kunjung usai. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat menganalisis implementasi WPS melalui kerangka implementasi organisasi internasional sehingga dapat menemukan intervensi yang lebih spesifik dari organisasi internasional terhadap Kongo.